

Eksplorasi Perempuan Dalam Meng-Gepeng Di Kota Denpasar: Potret Buram Dari Modernisasi Dan Kapitalisasi

Ni Luh Putu Tejawati

Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali

tejawatiputu@gmail.com

Penelitian ini mengungkapkan tentang Eksplorasi Perempuan Dalam Meng-gepeng di Kota Denpasar : Potret Buram dari Modernisasi dan Kapitalisasi. Sebagai kajian kualitatif dan sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) karakteristik gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas di Kota Denpasar, (2) faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan melakukan aktivitas sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar, (3) pola menggepeng yang mereka lakukan di Kota Denpasar, dan (4) strategi menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar dalam perspektif pendidikan.

Di dalam menganalisis permasalahan-permasalahan di atas peneliti menggunakan beberapa landasan teori, seperti : teori fenomenologi, teori hegemoni, dan teori sosiokultural. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan tersebut, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian dicek dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik gepeng di Kota Denpasar dapat dibedakan ke dalam beberapa aspek, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan, daerah asal, dan tempat tinggal di Kota Denpasar.

Perempuan yang melakukan aktivitas sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang dibedakan antara faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong, seperti : ekonomi, ekologi, lingkungan sosial, dan sikap mental. Sementara faktor penarik, seperti : masyarakat Denpasar memberikan peluang, dan Kota Denpasar sebagai pusat perekonomian.

Pola kerja gelandangan dan pengemis yang beroperasi di Kota Denpasar melalui beberapa tahapan, antara lain : tahap persiapan, pemilihan lokasi dan waktu menggepeng, sasaran dan penghasilan gepeng, serta tempat istirahat mereka.

Gelandangan dan pengemis merupakan bentuk patologi sosial yang perlu pengentasan lebih manusiawi sehingga mampu membuat mereka lebih mandiri. Adapun strategi penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Denpasar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti : penertiban, pembinaan, serta pemantauan dan penyadaran, yang melibatkan institusi pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga.

Kata kunci : perempuan, gelandangan dan pengemis, modernisasi

Pendahuluan

Upaya perempuan untuk mensejajarkan dirinya dengan laki-laki merupakan usaha untuk mengubah kultur masyarakat dari patriarki ke kesetaraan gender. Hal ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas peradaban manusia. Oleh karena itu, dalam menjelaskan masalah antara perempuan dan laki-laki, sangat diperlukan adanya pemahaman atas konsep gender yang merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan tersebut. Posisi perempuan yang ter subordinasi laki-laki menyebabkan keterlibatannya dalam berbagai ajang aktivitas sering dianggap bertentangan dengan kodratnya. Hal ini disebabkan karena konstruksi sosial budaya yang meletakkan peran antara laki-laki dan perempuan secara berbeda-beda berdasarkan pemahaman perbedaan biologis, sehingga dalam masyarakat berkembang ideologi gender yang menempatkan bahwa ranah domestik adalah dunianya perempuan dan ranah

publik merupakan dunianya laki-laki. Kondisi ini cenderung menjadi faktor penyebab terjadinya perlakuan yang kurang menguntungkan bagi perempuan seperti perlakuan diskriminatif (Arjani, 2003:8)

Laki-laki dan perempuan secara kasat mata berbeda, terlihat pada alat kelaminnya. Perbedaan ini bersifat biologis, alamiah, dan tidak bisa dirubah. Dia dikonstruksi secara sosiokultural sehingga melahirkan gender, yakni tanggung jawab, peran, pola perilaku, kualitas-kualitas, dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminim (Bhasin, 2002; Fakih, 1996; Illich, 1998). Gender tidak bisa dilepaskan dari ideologi, karena ideologi sebagai sistem berpikir, sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik berhubungan erat dengan tindakan sosial dan politik. Ideologi menyediakan justifikasi untuk perilaku sosial dan struktur sosial ekonomi (Bhasin, 2002; O'neil, 2001; Storey, 2003).

Ideologi yang kuat pengaruhnya terhadap pengkonstruksian gender pada

masyarakat Bali adalah ideologi patriarki atau Fromm (2002: 177) menyebutnya dengan istilah budaya patriarkal. Budaya patriarkal tidak hanya berwujud ideologi, melainkan terkait pula dengan struktur sosial, yakni laki-laki memiliki superioritas, bahkan berhak mendominasi perempuan dengan berbagai cara (Bhasin, 1996, 2002).

Pendominasian tersebut sering pula diperkuat oleh agama sehingga subordinasi laki-laki atas perempuan tidak hanya bercorak dominasi, tetapi juga mengarah kepada hegemoni. Kesempatan perempuan untuk keluar dari arena domestik dan bekerja di luar rumah (atau di luar desa dalam kasus perempuan migran) dapat dipengaruhi oleh kesadaran baru perempuan atau karena pergeseran sistem nilai yang memungkinkan perempuan meninggalkan rumah (Abdullah, 2001 : 104). Keterlibatan perempuan dalam perekonomian sudah berlangsung sejak dulu terutama keterlibatannya dalam bidang pertanian yang sampai saat ini masih terdapat dalam masyarakat. Secara

psikologis kerja bagi perempuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki status sosial mereka dalam lingkungan komunitasnya.

Hakekat manusia tidak hanya sebagai makhluk ada dan memiliki, tetapi juga makhluk menjadi (Fromm, 1987). Dalam artian, dia selalu ingin aktif guna menjadi sesuatu, mampu untuk memperoleh sesuatu untuk memenuhi hakikatnya sebagai makhluk memiliki (Atmadja, 1999). Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari bantuan orang lain. Manusia tidak dengan sendirinya memanusia tetapi mereka memerlukan bantuan atau sentuhan pendidikan.

Kenyataannya dalam masyarakat tidak semua orang mampu menikmati fasilitas pendidikan karena sistem pendidikan kita baru mampu memikirkan kelompok warga masyarakat yang relatif berkecukupan dari golongan pendapatan yang paling tinggi dan menengah serta masih sedikit menggarap kebutuhan edukatif kelompok-kelompok rakyat dari strata

ekonomi lemah. Di samping itu, juga belum banyak melibatkan tema kemiskinan yang ada di daerah-daerah pedesaan untuk dipertanyakan atau didiskusikan dan dipecahkan masalahnya (pendidikan problematisasi) (Kartono,1997: 37). Yunus (2007: 73) juga menegaskan bahwa sampai saat ini masih terbukti pendidikan sama sekali belum bersemayam bagi masyarakat miskin padahal mendahulukan yang miskin merupakan nilai yang menentukan sebagai keputusan dalam setiap karya pendidikan di Indonesia.

Menurut Mangunwijaya (1999: 69), dalam bidang apapun kaum miskin merupakan kelompok masyarakat yang selalu kalah. Kelompok ini tidak punya *bargaining power* sama sekali, sehingga di manapun mereka berada selalu sebagai pecundang, baik dari sisi kekuasaan, harta, dan pendidikan. Bahkan, yang sering melekat pada kaum miskin adalah kehinaan, kepapaan, kemiskinan, pelacuran, dan kriminalitas. Semua itu, tidak bisa dihapus tetapi hanya dapat dicegah.

Salah satu kelompok miskin sebagai gejala sosial yang terwujud di perkotaan adalah gepeng (gelandangan dan pengemis). Kelompok ini telah menjadi masalah sosial, karena di satu sisi menyangkut kepentingan orang banyak atau warga kota yang merasa wilayah tempat hidup dan kegiatan mereka sehari-hari telah dikotori oleh gepeng. Di sisi lain menyangkut kepentingan pemerintah yang melihat kehadiran gepeng di kota khususnya di jalan-jalan protokol memberikan kesan yang kurang baik. Selain itu, kehadiran gepeng akan semakin mempersukar pengendalian keamanan dan ketertiban sosial, karena masalah ini menyangkut program pembangunan pemerintah yang berkenaan dengan kesejahteraan kehidupan rakyat (suparlan,1984: 35-36).

Aktivitas menggepeng sebagian besar dilakukan oleh perempuan dari segala usia, seperti : anak-anak, ibu-ibu maupun nenek-nenek bahkan di Kota Denpasar jarang sekali kita menemukan penggepeng yang berasal dari laki-laki dewasa. Fenomena ini erat kaitannya dengan

budaya patriarki yang berlaku sangat kuat dalam kehidupan Masyarakat Bali. Pengalaman menunjukkan, jika orang tua beranak banyak dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di sisi lain modal finansial sangat terbatas, maka anutan dualisme kultural dan ideologi patriarki acap kali berujung pada pemarginalan terhadap anak perempuan. Anak perempuan yang dikorbankan, yakni diputuskan sekolahnya, sebaliknya anak laki-laki diberikan prioritas utama dalam mengenyam pendidikan formal.

Istilah *gepeng* merupakan singkatan dari kata *gelandangan* dan *pengemis*. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1992), *gelandangan* adalah kata *gelandangan* dan *pengemis*. Menurut Departemen Sosial R.I (1992), *gelandangan* adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di

tempat umum. “*Pengemis*” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

Ali, dkk, (1990) menyatakan bahwa *gelandangan* berasal dari *gelandang* yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (*lelana*). Mengutip pendapatnya Wirosardjono maka Ali, dkk., (1990) juga menyatakan bahwa *gelandangan* merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian maka *gelandangan* merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali dkk, (1990: 18-19) *Gepeng* (*gelandangan* dan *pengemis*) merupakan fenomena kemiskinan, sosol, ekonomi, dan budaya sekelompok masyarakat yang

menempati lapisan sosial terbawah. Lebih lanjut dikemukakan, tiga gambaran umum gelandangan yaitu (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, (3) pola atau cara hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Menurut Onghokam (1984: 3), istilah gelandangan berasal dari gelandang berarti selalu mengembara. Selanjutnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S Poewardaminta disebutkan bergelandangan adalah berjalan-jalan ke sana-sini tidak tentu maksudnya, sedangkan orang gelandangan adalah orang bergelandangan atau tak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya (Khayam, 1984:149). Sementara itu, Noer Effendi (1984: 68) menyebutkan gelandangan adalah predikat yang disandang oleh sekelompok anggota masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan layak, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak, serta makan minum di sembarang tempat. Lebih lanjut dinyatakan pula

bahwa gelandangan umumnya merupakan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tanda pengenal, berperilaku hidup bebas cenderung liar, dan mengambil sisa-sisa makanan atau barang bekas.

Perilaku gepeng seringkali dianggap tidak selaras dengan sistem sosiokultural yang dianut oleh masyarakat dan dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang yang lebih jauh dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan dalam masyarakat. Menurut (Horton dan Hunt, 1996) penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap tindakan tersebut. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.

Di Bali aktivitas gepeng dapat dijumpai hampir di setiap kabupaten

atau kota, seperti Denpasar, Badung, Buleleng, Tabanan, Gianyar, Bangli, dan Negara. Bahkan, Denpasar sebagai ibukotanya Bali yang wilayahnya relatif sempit merupakan salah satu daerah yang paling diincar oleh para gepeng. Kota Denpasar yang mengarah pada kota metropolis dengan semakin dominannya peranan sektor tersier dengan berbagai aktivitas masyarakat perkotaan yang cenderung membutuhkan pelayanan jasa, perdagangan, perbankan, serta jasa perusahaan telah menjadikan sektor tersier sebagai lapangan usaha yang dipilih dalam menciptakan nilai tambah.

Pesatnya pembangunan Kota Denpasar secara fisik dan non fisik menimbulkan beberapa dampak, salah satunya semakin menjamur aktivitas menggepeng yang sangat bertentangan dengan slogan Kota Denpasar yang ingin mewujudkan pemerintahan bersih dan berwawasan budaya. Dalam penelitian ini gepeng yang dimaksud adalah sekelompok masyarakat yang hidupnya mengembara atau tidak memiliki tempat tinggal tetap di Kota

Denpasar dan melakukan kegiatan meminta-minta. Keberadaan mereka sering dianggap sebagai polusi kota karena gepeng selalu identik dengan kemiskinan, kebodohan, dan kemalasan yang selalu terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan slogan Kota Bersih dan Berbudaya acapkali keberadaan gepeng di tengah kota dianggap mengotori wilayah mereka sehingga berulang kali para gepeng ini dirazia (ditangkapi) oleh Dinas Tramtib, tetapi penangkapan ini tidak mampu menimbulkan rasa jera penggepeng, bahkan aktivitas mereka semakin marak. Meskipun kehadiran gepeng tidak dikehendaki oleh masyarakat karena mereka dianggap sebagai suatu bentuk kemalasan manusia sehingga seringkali mereka dilecehkan seperti, dibentak, dimaki-maki, diusir, ditangkapi oleh aparat pemerintah, namun aktivitas mereka tetap eksis dan gerakannyapun cukup teroganisir.

Permasalahan gepeng ini oleh pemerintah daerah dianggap sebagai lingkaran setan, walaupun

ditertibkan, mendapat karantina, dan pembinaan dari Dinas Sosial, selanjutnya dipulangkan, tetapi selang beberapa hari beberapa diantara mereka kembali lagi ke kota untuk menggepeng. Fenomena gepeng bagaimanapun caranya, dimanapun dilakukan, sebenarnya menyimpan berbagai persoalan antara lain: (1) Gepeng mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda-beda, yang penanganannya harus sesuai dengan persoalan masing-masing. (2) Penanganannya oleh petugas (Tramtib, Pol PP, dan Tibum) cenderung bersifat agak represif sehingga dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi perkembangan anak-anak. (3) Langkah penanganan oleh Dinas Sosial dengan pembinaan dan pemulangan kembali ke daerah asal adalah solusi sesaat, sementara akar permasalahannya perlu pendekatan yang holistik untuk mendapatkan jawaban yang tepat.

Bertolak dari kenyataan ini ada beberapa masalah yang menarik dan sangat penting untuk dikaji agar keberadaan para gepeng tidak menjadi

permasalahan klasik yang sulit diberantas. Masalah tersebut dapat dirumuskan ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Eksplorasi Perempuan Dalam Meng-gepeng di Kota Denpasar : Potret Buram dari Modernisasi dan Kapitalisasi”**.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat penelitian kebudayaan dengan sasaran pokok yaitu menyusun etnografi tentang gelandangan dan pengemis : latar belakang, proses menjadi, dan penanggulangannya dalam perspektif pendidikan. Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu bentuk penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit : individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Suryabrata, 1998:22). Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar, tentang latar belakang, proses menjadi, dan penanggulangannya dalam perspektif pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Eksplorasi Perempuan Dalam Meng-gepeng di Kota Denpasar : Potret Buram dari Modernisasi dan Kapitalisasi

Pada masa kerajaan, perekonomian masyarakat Denpasar merupakan ekonomi tertutup yang subsistensi hanya mencukupi kebutuhan sendiri dan transaksi secara barter (Agung dkk, 1986:46). Kemudian pada masa kolonial, seiring dengan keinginan pemerintah kolonial untuk membuka jalan dan jembatan sebagai salah satu sarana membuka perekonomian, maka perekonomian masyarakat Denpasar mengalami perkembangan sebagai sistem ekonomi terbuka dengan memperkenalkan sistem ekonomi uang dimana transaksi berdasarkan barter semakin mengendur diganti dengan beredarnya uang, sehingga perekonomian semakin dinamis.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari derasnya perubahan sosial yang diakibatkan oleh paradigma pembangunan yang dianut oleh pemerintah. Tidak semua lapisan

masyarakat mampu mengakses berbagai kebutuhan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi tersebut. Karena itulah, pembangunan selalu bermuka dua seperti satu buah keeping uang logam, bisa berdampak positif tetapi juga negatif. Efek negatif dari pembangunan tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan sehingga selalu diperlukan usaha untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya. Gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu dampak negative pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan.

Karakteristik gepeng yang beroperasi di Kota Denpasar dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimaksud berupa umur, jenis kelamin, daerah asal, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan kondisi orang tua mereka.

Karakteristik yang dimiliki oleh gepeng setidaknya dapat memberi gambaran kepada kita tentang permasalahan sehari-hari yang dihadapi para gepeng di jalanan, seperti

: kondisi ekologi, kondisi orang tuanya, aspirasi mereka ikut menggepeng sehingga kita dapat memikirkan upaya mengatasi permasalahan mereka secara lebih manusiawi.

Dalam kaitannya dengan gepeng ada indikasi bahwa keberadaannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari individu itu sendiri serta berbagai alasan lainnya yang telah dimiliki oleh masyarakat di suatu daerah yang kemudian menjadi faktor pendorong atau *push factor*. Sebaliknya, keramaian kota, kemurahan hati masyarakat, dan mudahnya mencari uang di kota menjadi faktor penarik seseorang menjadi gepeng.

Pola kerja sebagai suatu kesatuan menyeluruh mengandung arti bukan sekedar penjumlahan bagian-bagian. Konsep ini mengandung makna bahwa bagian-bagian dari keseluruhan tersebut telah terpadu dalam bentuk yang lebih bermakna, karena di dalamnya terjadi saling mempengaruhi dan ketergantungan antara beberapa bagian

atau aspek. Maka pola menggepeng yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada keterlibatan dan cara kerja mereka lakukan dalam mendapatkan penghasilan, meliputi (1) tahap persiapan, (2) tahap pemilihan lokasi dan waktu menggepeng, dan (3) sasaran dan penghasilan gepeng.

Kegiatan menggepeng sangat dilarang dan penuh resiko tetapi hal ini tidak berjalan dengan efektif karena semakin hari jumlah gepeng yang beroperasi di Kota Denpasar terus meningkat dengan modus yang bervariasi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemda Kota Denpasar dalam menangani masalah gepeng, antara lain : (1) Penertiban dan Penangkapan, (2) Pembinaan dan Pemulangan. Pemecahan masalah gepeng hendaknya dilakukan secara manusiawi bukan dengan paksaan atau represif, seperti merazia (menangkap), diangkut seperti seorang penjahat, dan dibuang jauh dari pandangan orang banyak.

Pendekatan yang paling cocok adalah dengan mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga

nantinya mereka akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun beberapa konseptual yang bisa dikembangkan untuk menanggulangi gepeng secara manusiawi yang selaras dengan hakekat pendidikan (proses memanusiakan manusia).

Masalah gelandangan adalah masalah yang kompleks karena berkaitan satu sama lain dengan seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga pola pemecahannya harus secara terpadu yang melibatkan banyak pihak yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan pendekatan manusiawi, yang memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi yang perlu dibantu perkembangannya untuk dapat merubah kondisi hidupnya.

Kesimpulan

Karakteristik gepeng yang beroperasi di Kota Denpasar dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang dimaksud berupa umur, jenis kelamin, daerah asal, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan kondisi orang tua mereka. Di Denpasar ada beberapa tempat yang

dipilih sebagai tempat tinggal, seperti di daerah Batu Bulan dibelakang stand bunga, Daerah Panjer, beberapa tempat di wilayah Teuku Umar, dan banyak lagi wilayah-wilayah lain di Denpasar yang digunakan sebagai tempat domisili sementara terutama wilayah-wilayah yang agak tersembunyi sehingga bisa menghindarkan mereka dari operasi penertiban.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan melakukan aktivitas sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar meliputi: keputusan mereka untuk menggepeng sebagian besar didasari oleh alasan ekonomi yang lama-kelamaan aktivitas ini dianggap sebagai sebuah pekerjaan.

Ketiadaan lahan pertanian, kondisi ekologi yang gersang terutama di musim kemarau serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi pertanian lahan kering menyebabkan masyarakat yang miskin terpaksa keluar dari dusunnya untuk mencari penghasilan sebagai gepeng.dengan kegiatan menggepeng,

tidak bisa dilepaskan dari faktor keluarga.

Pola menggepeng yang mereka lakukan melalui beberapa tahapan, meliputi : (1) tahap persiapan diawali dengan pembentukan kelompok yang umumnya berasal dari satu daerah sehingga akan memudahkan mereka berinteraksi dan dapat melahirkan kerjasama yang solid antar gepeng terutama dalam menentukan lokasi menggepeng, (2) tahap pemilihan lokasi dan waktu menggepeng.

Strategi menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di kota Denpasar, meliputi:

1. penertiban dan penangkapan yang dilakukan oleh Dinas Ketentraman Ketertiban (Tramtib) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar.
2. Pembinaan dan Pemulangan, gepeng yang terjaring dalam operasi penertiban ditampung di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Denpasar.
3. Strategi Penanggulangan Gepeng dalam Perspektif Pendidikan, meliputi: (a) proses penyadaran diri, (b) kontak langsung atau

berdialog, (c) menghilangkan label sebagai gepeng, (d) memberikan pendidikan formal yang layak, (e) memberikan pelatihan ketrampilan melalui pendidikan non formal, dan (f) menyadarkan masyarakat agar tidak memberi peluang pada gepeng.

Daftar Pustaka

- Alkostar, artidjo. 1984. "Potret Kehidupan Gelandangan Kasus Ujung Pandang dan Yogyakarta". Dalam *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Anom Umbara, A.A Ngurah. 1994. *Menyoroti Masalah Desa Tertinggal dan Gepeng di Desa Tianyar Tengah*. Denpasar: Laporan Hasil Penelitian.
- Arbi, Z. 1998. "Revolusi Komunikasi dan Globalisasi". Dalam Yaya M. Abdul Aziz (ed), *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke-21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmadja, N.B.1999. *Pendidikan sebagai homonisasi dan humanisasi dalam perspektif Agama Hindu*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Aneka Widya. Singaraja: STKIP Singaraja.

- Budiman, Arief. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita dalam Masyarakat.*Jakarta : PT Gramedia.
- Fakih, M. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial.*Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ihromi, T.O. 2004. "Beberapa Catatan Mengenai Pengkajian Keluarga dalam Masyarakat yang Berubah. Dalam T.O. Ihromi (ed). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1977. *Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti.* Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender.*Bandung : Mizan.
- Suryabrata, Sumadi. 2001. *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.